

IMPLEMENTASI PERENCANAAN ANGGARAN DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN PASCA COVID-19 PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM

*(IMPLEMENTATION OF BUDGET PLANNING TO ENHANCE THE
ACCOUNTABILITY OF PERFORMANCE OF THE INTELLIGENCE AND
IMMIGRATION ENFORCEMENT SECTION POST COVID-19 AT THE CLASS
I IMMIGRATION OFFICE IN MATARAM)*

DOI : <https://10.0.205.137/jaid.v4i1.599>

Submitted: 11-02-2024 Reviewed: 14-04-2024 Published: 11-05-2024

Andria Setiawan
andriansetiawan692@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Rita Kusuma Astuti
ritakusumaastuti@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Pascalis D. K. Wibowo
pascalisdanny4@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abstract. *The main problem ini government finance is the imbalance between income and expenditure, which is rooted in a lack of state income and large expenditures. This research aims to analyze the implementation process of budget planning in the Immigration Intelligence and Enforcement section in the post-Covid-19 pandemic. In the context of public policy implementation, this research focuses on the concrete steps taken in impementing the budget at the TPI Mataram Class I immigration Office. The budget is considered an important political instrument in the public sector, planning is a key elemnt in the budget absorption process. Budget allocations must be consored carefully to achieve the organizatio's vision and mission. Agency theory is used to explain the dynamics of the relationship between authorities and implementers in managing budget resources. This research uses a type of research using an evaluation type with a qualitative approach. To analyze budget planning to increase accountability for the performance of the Intelligence ana Immigration Enforcement section at the TPI Mataram Class I Immigration Office. Data collection techniques through interviews, observation and. documentation. Based on research conducted reagrding budget planning, the existing budget is in accordance with the budget planning carried out, but on the other hand, what is still a problem is the availability of human resources to carry out Immigration duties and functions.*

Keywords: *Implementation, Resources, Covid-19*

Abstrak. Permasalahan utama di bidang keuangan pemerintah adalah ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, yang berakar pada kurangnya pemasukan negara dan pengeluaran besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi perencanaan anggaran pada seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di masa pasca pandemi Covid-19. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, penelitian ini berfokus pada langkah konkret yang diambil dalam melaksanakan anggaran di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Anggaran dianggap sebagai instrumen politik penting di sektor publik, perencanaan menjadi elemen kunci dalam proses penyerapan anggaran. Alokasi anggaran harus dipertimbangkan dengan cermat untuk mencapai visi misi organisasi. Teori agensi digunakan untuk menjelaskan dinamika hubungan antara otoritas dan pelaksana dalam pengelolaan sumber daya anggaran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian menggunakan jenis evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Untuk menganalisis perencanaan anggaran untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Kelas I TPI Mataram. Teknik pengumpulan data melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait perencanaan anggaran, anggaran yang ada sudah memenuhi sesuai dengan perencanaan anggaran yang dilakukan, namun di sisi lain yang masih menjadi permasalahan adalah ketersediaan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian.

Keywords: Implementasi, Sumber daya, Covid-19

1. PENDAHULUAN

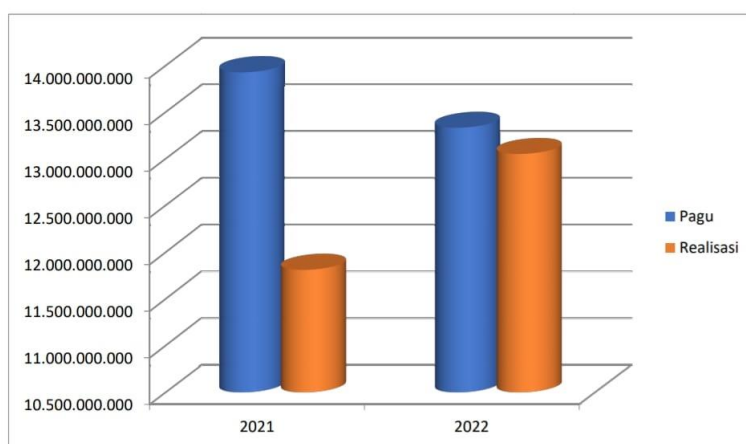
Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi secara signifikan terhadap pengelolaan anggaran seluruh negara di dunia termasuk Indonesia yang masih dalam status negara berkembang. Mulai dari adanya penurunan pendapatan negara yang dihasilkan dari pajak dan pendapatan yang dihasilkan bukan dari pajak (PNBP) hal ini ditandai dengan terjadinya kontraksi ekonomi sebesar -1,5% berdasarkan laporan kinerja APBN. Dengan adanya penurunan pendapatan negara tersebut terdapat pengaruh lain yang menjadi faktor utama terganggunya stabilitas keuangan sebuah negara yakni peningkatan pengeluaran negara di sektor kesehatan dan perlindungan sosial. Skala prioritas yang berubah membawa negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk kembali menyesuaikan anggaran yang dimiliki untuk mendukung respon pandemi, seperti pembangunan fasilitas kesehatan darurat atau meningkatkan kapasitas tes Covid-19 serta perlu adanya vaksinasi secara nasional. Disisi lain dalam menghadapi pandemi Covid-19, strategi ekonomi mengutamakan alokasi dana untuk penanggulangan pandemi. Menjaga prioritas terhadap pendanaan penanggulangan banyak dibebankan ke dalam DIPA Kementerian/Lembaga yang dikemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.05/2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019.

Capaian kinerja dari sektor keuangan, penyerapan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram tahun 2022 telah mencapai 97,87% atau sebesar Rp. 13.053.746.279 dari total anggaran yang diberikan sebesar Rp. 13.337.327.000. sebagian kegiatan seperti perjalanan dinas, rapat koordinasi, dan sosialisasi dilakukan dengan kombinasi antara tatap muka dan melalui platform virtual. Meskipun realisasi anggaran belum mencapai 100% dari target, namun dari segi kualitas kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi Mataram. Selain pelaksanaan program-program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kerja bisa dibilang juga disebabkan oleh isu strategis dan kondisi yang dihadapi saat ini.

Tahun 2021			Tahun 2022		
Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
13.929.436.000	11.818.738.584	84.85	13.337.327.000	13.053.746.279	97.87

Tabel 1 Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2021 dan 2022

Sumber : LAKIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Tahun 2022



Gambar 1. Perbandingan Penyerapan Anggaran TA 2021 & 2022

Sumber: LAKIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram 2022

Meskipun beberapa anggaran tidak terserap dengan optimal, pimpinan hanya perlu melakukan sedikit perubahan dengan menginisiasi metode pelaksanaan kegiatan melalui rapat koordinasi dan sosialisasi. Dalam hal ini kebijakan pimpinan sangat berperan penting dalam rencana kegiatan seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, pentingnya dilakukan penelitian terkait dengan perencanaan anggaran agar alokasi anggaran yang ada dapat memadai dan mendukung rencana kegiatan intelijen dan penindakan Keimigrasian di wilayah Mataram. Rencana kegiatan yang telah disusun dapat tidak sesuai dengan rencana yang disepakati, hal ini biasanya disebabkan oleh isu strategis dan kondisi yang terjadi. Masalah ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kualitas SDM serta sarana prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan Keimigrasian yang optimal dan kualitas kinerja yang dipengaruhi oleh situasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya-upaya yang lebih konkrit seperti peningkatan sumber daya manusia dan pengadaan sarana prasarana yang memadai, sehingga mampu meningkatkan kapasitas serta kualitas dalam melakukan kegiatan Intelijen. Selain itu, perlu juga adanya pengelolaan yang efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang tersedia untuk menjaga kelancaran dan keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu 1) Bagaimana implementasi proses perencanaan anggaran pada seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pasca covid-19 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram?; 2) Apa saja solusi yang harus dilakukan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pasca Covid-19?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat fakta dan realitas secara keseluruhan yang utuh (*wholeness*). Model penelitian yang digunakan merupakan model evaluasi yang memberikan gambaran untuk dievaluasi terhadap suatu program untuk menilai kesesuaian rencana strategis dengan apa yang menjadi harapan. Pelaksanaan model ini dibagi menjadi dua, yaitu *formatif* dan *sumatif*. *Formatif* bertujuan untuk meneliti dan

melihat implementasi program. Sumatif dilakukan untuk mengukur pencapaian program terhadap tujuan yang ditetapkan (Saat & Maria, 2020). Proses pengumpulan data penelitian terus dimonitor supaya tingkat reabilitas dan validitas data senantiasa dapat terjaga (Siyoto & Sodik, 2015). Analisis data metode kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan dilaksanakannya penelitian, terdapat perbedaan dengan kuantitatif yang mengumpulkan data keseluruhan dari awal. Sejak dimulainya penelitian, peneliti yang menggunakan metode kualitatif sudah melakukan analisis data karena memiliki data yang diperlukan awal analisis. Menurut Moleong dalam (Siyoto & Sodik, 2015), analisis data kualitatif diawali dengan menelaah data yang dihimpun, setelah itu melakukan reduksi data, penyusunan, klasifikasi, lalu menafsirkan data.

3. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Perencanaan Anggaran Pada Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian

a. Perencanaan Anggaran

Proses perencanaan anggaran sendiri dilakukan oleh Ibu Nur Aini Anwar Nasution selaku kepala urusan keuangan dan melibatkan pejabat pembuat komitmen (PPK) di seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Menurut Ibu Nur Aini Anwar Nasution, A.Md., bahwa dalam proses perencanaan anggaran yang dilakukan pihak urusan keuangan dan PPK (pejabat pembuat komitmen) selalu melibatkan seksi teknis Keimigrasian khususnya seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian sejak awal perencanaan anggaran dan saat masa pandemi covid-19 dan beituapun setelahnya. Hal ini diyakini sebagai bentuk kolaborasi dan sinergitas antar seksi untuk merancang kebutuhan anggaran khususnya di bagian seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Ibu Nur Aini menjelaskan bahwa perencanaan anggaran untuk 2024 nanti biasanya akan dilakukan perkiraan anggaran atau akan dimintai perkiraan anggaran sementara untuk tahun 2024 di tahun 2023 sedangkan untuk tahun 2023 tentunya akan dimintai perkiraan sementara di tahun 2022, yang dituangkan dalam pagu indikatif. Pada saat itu akan dimintai untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan semaksimalnya dan disesuaikan dengan postur yang sudah ada. Postur adalah draft yang diberikan dari pihak Direktorat Jenderal Imigrasi yang didalamnya tertuang pedoman-pedoman terkait postur anggaran, postur anggaran adalah struktur atau rancangan yang terperinci dari alokasi dana atau sumber daya finansial dalam suatu organisasi atau proyek. Dalam proses penyusunan draft postur anggaran ini, Direktorat Jenderal Imigrasi akan memberikan draft tersebut pada kisaran bulan April (pertengahan tahun) di setiap tahun perencanaan terkait dengan pagu indikatif.

Pagu indikatif merupakan batasan atau angka yang telah

ditetapkan sebagai acuan atau panduan awal dalam penganggaran. Angka yang digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan alokasi dana atau sumber daya ke berbagai program dalam suatu organisasi. Pada saat keluar pagu indikatif, angka yang muncul di pagu indikatif ini bisa jauh dibawah angka kebutuhan atau mendekati angka kebutuhan. Pagu indikatif juga sangat mungkin disesuaikan selama proses penyusunan anggaran berlangsung, tergantung pada faktor-faktor seperti perubahan dalam kondisi ekonomi, penyesuaian kebijakan baru yang mempengaruhi kebutuhan dan prioritas anggaran.

Dilihat dari konteks teori *Principal-agent* atau teori agen merupakan kerangka kerja didalam sistem ekonomi yang menggambarkan hubungan antara pihak yang memiliki wewenang (principal) dan pihak yang bertindak atas nama mereka (agen). Perencanaan anggaran berfungsi sebagai alat yang membantu mengurangi masalah agen-principal dengan menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, perencanaan anggaran yang jelas dan terukur dapat membantu mengurangi informasi asimetris antara *principal* dan agen sebagai pelaksana. Perencanaan anggaran dalam konteks teori principal-agen tidak selalu sederhana. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika antara principal dan agen, seperti halnya kebijakan, budaya organisasi, dan regulasi pimpinan. Namun, pemahaman tentang teori principal-agen dapat membantu merancang dan mengimplementasikan perencanaan anggaran yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel dalam menghadapi tantangan yang muncul dari kedua hubungan ini.

RINCIAN KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (06) Ditjen Imigrasi
 UNIT KERJA (408247) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM
 ALOKASI Rp. 14,214,023,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Lokasi : KOTA MATARAM				
5254.BHB.U01	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	10.0 operasi		116,600,000	
051	Pengumpulan Data dan Informasi			115,000,000	U
A				115,000,000	
521219	TANPA SUB KOMPONEN			75,000,000	PNP
	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>				
	(KPPN.038-Mataram)				
	Biaya	10.0 KEG	7,500,000	75,000,000	
522141	- Pengamatan/ Penyusupan/ Penyurupan/ Penelitian/ Penje- jakan			40,000,000	PNP
	<u>Belanja Sewa</u>				
	(KPPN.038-Mataram)				
	- Safe House	10.0 KEG	2,000,000	20,000,000	
052	- Sewa Transportasi Dalam Rangka Operasi	10.0 KEG	2,000,000	20,000,000	
A				1,500,000	U
521219	Penyajian Laporan			1,500,000	PNP
	TANPA SUB KOMPONEN				
		10.0 KEG	150,000	1,500,000	
5254.BHB.U02	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>	36.0 operasi		419,400,000	
051	(KPPN.038-Mataram)			414,000,000	U
A	- Biaya Laporan			414,000,000	
521219	Operasi Mandiri di Wilayah			270,000,000	PNP
	Pelaksanaan Pengawasan				

Tabel 4.1 Rincian Kerja Satker TA 2023

Sumber : RKKS Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Tahun 2023

Data tabel diatas merupakan salah satu rincian kerja satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram khususnya seksi intelijen dan penindakan Keimigraian yang merupakan bagian penting dari perencanaan anggaran yang dilakukan. Dalam proses perencanaannya anggaran tidak selalu dilakukan dengan sempurna, terkadang anggaran tidak terencana dengan baik jika faktor yang ada didalamnya tidak berkolaborasi dengan baik. Dalam memastikan hal tersebut faktor keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi perencanaan anggaran harus dilibatkan secara maksimal.

b. Faktor keberhasilan dan kegagalan Implementasi perencanaan

Kantor Imigrasi dalam proses perencanaan anggaran dapat mengidentifikasi elemen-elemen dibawah ini sebagai landasan supaya proses implementasi serta merumuskan startegi bisa lebih terarah dan mencapai hasil yang diinginkan. Merujuk pada pandangan Gerge Edward III terkait faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dianggap penting dalam penyelenggaraan urusan publik.

- **Faktor Komunikasi**

Komunikasi merupakan inti dari interaksi manusia yang membentuk struktur organisasi. Ketika faktor komunikasi tidak seuai maka kepentingan antara berbagai pihak bisa terjadi ketimpangan yang dapat mengakibatkan kelalaian dalam tindakan intelijen dan penindakan yang didukung dengan kebutuhan anggaran. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seksi intelijen dan penindakan Keimigraian harus memperhatikan pola komunikasi, karena baik secara vertikal dan horizontal komunikasi menjadi hal utama yang perlu dilakukan untuk memastikan hal yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam hal komunikasi anggaran yang disusun juga tercantum kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang dimana terdapat berbagai elemen kerjasama, dan kegiatan ini berlaku tidak hanya satu kali dalam setahun, kegiatan ini mendukung program pengawasan inteljen. Dukungan anggaran dan komunikasi yang efektif memberikan dampak yang baik dalam impelementasi kegiatan melalui proses perencanaan anggaran dengan berbagai pihak.

- **Sumber Daya**

Dukungan anggaran yang memadai adalah fondasi untuk memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam opsional kegiatan intelijen dan penindakan Keimigraian. Perencanaan anggaran pasca covid-19 ini menyusun kembali sumber daya anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan intelijen sehingga kegiatan dapat berlangsung sesuai

dengan rencana strategis. Dalam lensa teori prinsipal dan agen, dukungan anggaran yang memadai setelah pandemi covid-19 membantu ketersediaan personel yang terlatih dan peralatan teknologi yang diperlukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi intelijen yang relevan.

**REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI
SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM**

SUB.BAGIAN/SEKSI	JENIS KELAMIN	
	L	P
Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	12	2

Tabel 4.2 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Sumber: LAKIP Mataram 2022

Tabel rekapitulasi diatas memberikan gambaran terkait jumlah pegawai di seksi intelijen dan penindakan Keimigrasian, dengan jumlah 12 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang masing-masing bertugas di komposisi masing-masing, diantara 14 orang hanya 6 orang yang bertugas intens dalam operasi pengawasan dan penindakan Keimigrasian, hal yang menjadi pertimbangan sangat penting ialah jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Mataram yang jumlah luas wilayah kerjanya yang sangat luas yang mengharuskan banyaknya personil yang dilibatkan. Tentunya sumber daya manusia dalam pengimplementasian dan pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian sangat berperan penting untuk mendukung operasi intelijen dan penindakan Keimigrasian.

- **Disposisi**

Mengkaji hal disposisi jika dipandang dari teori implementasi oleh Marilee S. Grindle, terdapat pengertian bahwa disposisi mendukung kebijakan mengacu pada sikap pemerintah, birokrasi, dan masyarakat yang bersedia berkolaborasi, beradaptasi, serta melibatkan diri aktif dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dalam hal disposisi ini harus mampu mendorong komunikasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan, memungkinkan pertukaran informasi yang penting untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul. Jika melihat hal ini dari kajian teori principal-agen tentunya kedua teori ini saling memiliki keterkaitan. Adanya hubungan timbal balik antara pelaku kebijakan dan penerima kebijakan serta lingkungan kebijakan tersebut di implementasikan membawa kepada struktur komunikasi birokrasi.

- **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi juga berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan. Struktur birokrasi yang rumit dan terfragmentasi dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Terlalu banyak lapisan hierarki dan prosedur yang panjang dalam struktur birokrasi dapat menghambat respons cepat terhadap perubahan situasi. Dalam kerangka teori agen dan prinsipal, hubungan antara anggaran dan struktur organisasi tercermin dalam bagaimana prinsipal merancang struktur organisasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Dukungan anggaran yang memadai memungkinkan prinsipal untuk merancang struktur yang efisien dan fleksibel, memfasilitasi aliran informasi yang baik antara agen dan prinsipal.

c. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perencanaan Anggaran

- **Faktor Internal**

Sejauh ini kebijakan yang ada tidak mengganggu proses perencanaan secara signifikan, namun di lain sisi dapat dikatakan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram merasa kekurangan sumber daya manusia di seksi intelijen dan penindakan Keimigrasian. Upaya untuk memecahkan kendala ini sering kali memerlukan pembentukan sumber daya manusia yang kompeten sejak awal. Kekurangan sumber daya manusia di seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menjadi tantangan yang sedang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Dalam konteks teori *principal-agent*, hal ini menciptakan potensi ketidaklarasan antara otoritas tertinggi yang mengharapkan implementasi kebijakan dan penggunaan anggaran yang efektif dan agent sebagai pelaksana memiliki keterbatasan personal. Jika ini dikaji dari teori yang dikemukakan oleh Marilee kekurangan personal dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dengan efektif. Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki tidak membuat pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram memiliki dampak yang signifikan.

- **Faktor Eksternal**

Pada sisi lain faktor waktu yang terbatas juga turut mempengaruhi proses perencanaan anggaran. Waktu menjadi faktor eksternal yang sangat penting dimana anggaran harus direncanakan dan disusun dengan memperhatikan pengaturan prioritas. Faktor kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang paling signifikan dalam merumuskan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada kinerja. Dalam konteks ini, pemimpin yang memiliki pemahaman yang mendalam di bidangnya cenderung memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi.

3.2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Analisis pada bagian ini menggunakan kajian pemahaman yang dirumuskan oleh Simbolon (2006:1). Pandangan umum terkait akuntabilitas ini menerangkan pada dua proses akuntabilitas yaitu:

a. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas secara vertikal mengacu pada sistem pertanggungjawaban terhadap pengelolaan anggaran yang digunakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Hal ini Kantor Imigrasi Mataram bertanggung jawab terhadap otoritas yang lebih tinggi dalam rantai komando. Tujuan utama dari akuntabilitas vertikal adalah untuk menjaga transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana serta menghindari penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran. Adanya pertanggungjawaban yang jelas ke otoritas yang lebih tinggi, resiko kesalahan atau tindakan yang merugikan keuangan negara dapat diminimalkan.

b. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas secara horizontal mengacu kepada bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat secara luas. Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dapat membantu dalam mengidentifikasi area perbaikan dan mengarahkan arah perubahan yang lebih baik. Dalam konteks akuntabilitas secara horizontal yang dilakukan oleh seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, diungkapkan juga oleh Bapak Pungki Handoyo selaku Kepala Kantor Imigrasi Mataram bahwa terlibatnya masyarakat yaitu melalui TIMPORA, sekitar 95% masyarakat dilibatkan dalam hal penindakan Keimigrasian dan adanya kolaborasi bersama instansi pemerintah lainnya untuk mendukung operasi intelijen dan penindakan Keimigrasian di wilayah Mataram.

c. Kriteria Akuntabilitas Keuangan

Konsep akuntabilitas keuangan sangat penting dalam pengelolaan anggaran publik. Menggunakan pandangan yang dirumuskan oleh Annisaningrum (2010), cerminan kemampuan organisasi untuk memenuhi standar tertentu dalam melaporkan tanggungjawab penggunaan anggaran. Dalam konteks ini akuntabilitas memperkenalkan beberapa kriteria utama dalam memenuhi pertanggungjawaban diantaranya:

- **Pertanggungjawaban Dana Publik**

Pertanggungjawaban dana publik memiliki dua dimensi utama, yakni pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja. Pertanggungjawaban keuangan melibatkan pelaporan yang akurat dan transparan terkait penggunaan dana publik, sedangkan pertanggungjawaban kinerja menilai sejauh mana dana publik telah menghasilkan dampak yang diharapkan. Aturan yang mengikat terkait dengan

pelaporan dan pertanggungjawaban tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

- **Penyajian Tepat Waktu**

Pertama, untuk semester pertama (semester I), jadwal penyerahan atau penyajian laporan direncanakan pada minggu pertama bulan Juli. Pada titik ini, diwajibkan untuk menyelesaikan laporan yang mencerminkan kinerja dan penggunaan dana pada semester tersebut. Selanjutnya, untuk semester kedua (semester II), laporan kinerja dan keuangan yang menjadi dasar pertanggungjawaban harus dilaporkan. Batas waktu penyerahan laporan tersebut ditetapkan paling lambat bulan Maret pada tahun berikutnya setelah semester II berakhir.

- **Adanya Pemeriksaan (Audit)**

Sistem pemeriksaan keuangan melibatkan kedua belah pihak, baik dari internal maupun eksternal. Pemeriksaan internal biasanya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen), entitas internal pemerintah yang bertanggung jawab untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di dalam organisasi. Di sisi lain, pemeriksaan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memfokuskan pada aspek kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip-prinsip akuntabilitas. Pemeriksaan dapat dilakukan setiap tahun dalam jangka waktu tertentu, seperti dua tahun sekali. Penentuan frekuensi pemeriksaan ini bergantung pada kebutuhan untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang pengelolaan keuangan, serta tingkat kompleksitas keuangan yang harus dievaluasi.

d. Dimensi Tolak ukur Mengevaluasi Kinerja Organisasi

- **Kualitas**

Kualitas pelaksanaan pekerjaan memiliki pengaruh yang langsung terhadap alokasi dan penggunaan anggaran. Dimensi kualitas yang melibatkan tingkat kesalahan, kerusakan, dan tingkat kecermatan dalam pelaksanaan pekerjaan memiliki implikasi yang kuat terhadap pencapaian tujuan dan pengelolaan dana. Integrasi kualitas dalam setiap tahap pelaksanaan pekerjaan menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan memastikan penggunaan anggaran dengan penuh pertimbangan.

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	3,82

Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	3,97
Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12	3,81

Tabel 4.3 Indikator Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022

Sumber: LAKIP Mataram 2022

Perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi, terutama pada tahun anggaran 2022, indikator capaian kinerja menjadi instrumen utama untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan telah terwujud. Dalam konteks Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, dalam targetnya 3,12 capaian yang berhasil diraih adalah 3.97. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dalam mengamankan aspek Keimigrasian di wilayah berjalan dengan sangat efektif dan berhasil mencapai hasil yang diinginkan.

- **Kuantitas**

Kuantitas memiliki peran besar dalam evaluasi dan akuntabilitas kinerja. Di dalam bidang penindakan Keimigrasian, kuantitas tindakan penegakan hukum mencerminkan intensitas usaha dalam menegakkan regulasi Keimigrasian. Keterkaitan antara kuantitas dan anggaran sangat nyata. Jumlah pekerjaan yang dihasilkan seringkali memerlukan alokasi dana yang sesuai untuk mendukung operasional. Penggunaan anggaran yang efektif menjadi penting untuk menjaga agar kuantitas tugas yang dihasilkan dapat tetap sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

- **Penggunaan Waktu dalam Bekerja**

Efisiensi waktu dalam bekerja memiliki dampak yang signifikan pada anggaran. Tingkat keterlambatan atau ketidakhadiran dapat mengganggu rencana kerja dan berpotensi menyebabkan penggunaan dana yang tidak optimal. Penggunaan waktu yang efektif dalam berbagai aspek kinerja, termasuk dalam seksi intelijen dan penindakan Keimigrasian, secara langsung berkaitan dengan pengelolaan dana yang cerdas. Efisiensi waktu tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga meminimalkan pemborosan dana dan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.

- **Kolaborasi dengan Rekan Kerja dalam Menjalankan Tugas**

Kolaborasi antar anggota tim dalam seksi intelijen dan penindakan Keimigrasian menjadi fondasi utama, bagi analisis informasi yang efektif. Kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, TNI, masyarakat, dan aparat penegakan hukum lainnya, yang dapat meningkatkan efektivitas dalam mengatasi pelanggaran hukum Keimigrasian. Kolaborasi yang baik tidak hanya meningkatkan kinerja tetapi juga berdampak positif pada pengelolaan anggaran. Kolaborasi tidak hanya berdampak pada kinerja

tetapi juga pada pertukaran informasi yang penting dalam keamanan nasional dan penindakan Keimigrasian. Dengan berbagai data dan analisis, kolaborasi memungkinkan seksi intelijen dan penindakan Keimigrasian untuk memahami konteks yang lebih luas dan merencanakan tindakan yang lebih baik.



Gambar 1.3 Rapat Kerjasama TIMPORA

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Tahun 2022

e. Solusi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam mengatasi tantangan yang ada dalam sistem akuntabilitas kinerja, solusi yang diperlukan. Pertama, organisasi harus mengadopsi sistem pengukuran kinerja yang akurat dan relevan dengan kondisi saat ini. Kedua, diperlukan sistem pelaporan yang transparan dan terpercaya, yang memungkinkan pihak internal dan eksternal untuk memantau pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran. Melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Kedua peraturan untuk memastikan adanya acuan dalam sistem akuntabilitas keuangan. Salah satu yang digunakan Kementerian Keuangan adalah IKPA.

- **IKPA (Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran)**

IKPA merupakan suatu indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam perannya sebagai Badan Usaha Negara (BUN). Tujuan dari indikator ini adalah untuk mengukur mutu kinerja dalam pelaksanaan dalam melaksanakan anggaran belanja yang terkait dengan entitas Kementerian Negara atau Lembaga. IKPA memiliki fungsi utama sebagai sarana pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran. Pemantauan ini berfokus pada anggaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan terintegrasi dengan Sistem Pemantauan Online (Online Monitoring – OM) SPAN.

Melalui IKPA, organisasi dapat mengidentifikasi area dimana penggunaan anggaran tidak efisien. Ini memungkinkan perbaikan dan penyesuaian yang lebih baik dalam alokasi dana, menghindari pemborosan yang tidak perlu. IKPA membantu organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi dengan mengandalkan data dan bukti nyata, keputusan yang dibuat cenderung lebih akurat dan relevan pada tujuan organisasi.

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2021 KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2021					
Bulan Penilaian	Nilai Aspek				Nilai Akhir Total/Konversi Bobot
	Kesesuaian Perencanaan Dengan Pelaksanaan	Kepatuhan Terhadap regulasi	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	
Januari	200.00	100.00	113.98	80.00	98.41
Februari	200.00	100.00	118.21	80.00	98.63
Maret	200.00	100.00	110.99	80.00	94.06
April	92.97	100.00	78.72	80.00	85.06
Mei	91.89	100.00	81.18	85.00	86.91
Juni	92.92	100.00	88.46	85.00	91.30
Juli	91.52	97.00	90.78	85.00	91.31
Agustus	90.91	97.50	91.76	90.00	92.35
September	91.19	95.00	92.38	90.00	91.74
Oktober	90.97	95.25	89.18	90.00	89.55
November	91.65	95.75	91.82	90.00	91.51
Desember	91.65	96.00	92.79	90.00	92.28

Tabel 4.4 IKPA Tahun 2021

Sumber: Hasil olahan peneliti dari IKPA

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2022 KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2022				
Bulan Penilaian	Nilai Aspek			Nilai Akhir Total/Konversi Bobot
	Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	
Januari	100.00	79.99	48.06	67.78
Februari	100.00	91.23	75.70	85.16
Maret	100.00	100.00	100.00	100.00
April	100.00	92.70	68.40	84.80
Mei	92.69	95.21	86.83	90.45
Juni	89.52	99.75	100.00	97.65
Juli	90.04	97.72	87.77	92.67
Agustus	90.54	98.77	92.48	94.99
September	91.35	99.87	100.00	98.14
Oktober	92.21	99.02	94.46	96.08
November	91.97	99.57	97.76	97.40
Desember	91.97	99.92	100.00	98.31

Tabel 4.5 IKPA Tahun 2022

Sumber: Hasil olahan peneliti dari berbagai sumber

NILAI IKPA	98,31
-------------------	--------------

Tabel 4.6 Nilai IKPA 2022

Sumber: LAKIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram 2022

- **SMART (Sistem Monitoring Kinerja)**

Sistem Monitoring Kinerja terpadu (SMART) adalah sistem yang merangkum pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi dalam satu platform terintegrasi. Ini mencakup pengumpulan data yang berkaitan dengan tujuan, indikator kinerja, dan target, serta pelaporan yang memberikan pandangan menyeluruh tentang pencapaian kinerja organisasi. Melihat konteks pengelolaan anggaran, SMART berperan penting dalam memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. SMART memungkinkan organisasi untuk lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan yang muncul melalui data yang terus menerus diperbaharui organisasi dapat dengan cepat mengidentifikasi ketidakseimbangan dan mengambil tindakan perbaikan.

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

NILAI SMART	99,69
--------------------	--------------

Tabel 4.7 Nilai SMART 2022

Sumber: LAKIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram 2022

Capaian kinerja anggaran yang diukur dengan nilai SMART sebesar 99.69, adalah indikator yang sangat mengesankan dalam pengelolaan dana publik. Nilai 99.69 menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram telah berhasil melampaui ekspektasi dan target yang telah ditetapkan. Ini merupakan indikasi bahwa organisasi tidak hanya fokus pada pengelolaan anggaran, tetapi juga pada pencapaian hasil yang berkualitas.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan anggaran publik adalah kunci untuk memastikan efektivitas dan integritas dalam kebijakan dan program yang dilaksanakan. Kualitas implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh dinamika antara keduanya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hal ini membantu organisasi (Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram) dan peneliti dalam merancang penulisan dan melihat kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan anggaran. Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan tambahan pada akuntabilitas dan evaluasi kinerja pelayanan publik. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Luas wilayah yang cukup besar tentunya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram memerlukan sumber daya yang besar. Sumber daya yang sangat diperlukan ialah tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya anggaran terutama dalam bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Jumlah personil yang terbatas menjadi hambatan dalam pengelolaan tugas dan fungsi Intelijen dan Penindakan, dari hal tersebut memaksa para pegawai di seksi tersebut untuk bekerja ekstra untuk memaksimalkan pekerjaan yang telah ditetapkan. Proses perencanaan anggaran, ratifikasi anggaran, pelaksanaan anggaran, serta proses dilakukannya evaluasi dilaksanakan dengan sangat baik dan matang.

Indikator pengukur akuntabilitas kinerja melalui IKPA dan SMART yang merupakan inovasi keuangan untuk menjadi akuntabilitas kinerja menjadi solusi yang mumpuni. Kedua hal ini memiliki keterkaitan dan sistem yang saling terintegrasi untuk menghasilkan informasi keuangan di setiap satuan kerja pemerintah. Penggunaan IKPA dan SMART merupakan sebagai alat pengukuran dan pemantauan telah membantu meningkatkan akuntabilitas. Implementasi anggaran yang baik, didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kunci untuk menghadapi tantangan zaman.

REFERENSI

- Ariwibawa, Y., Rachmina, D., & Falatehan, A. F. (2018). Strategi Peningkatan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22703
- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. (2022). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022*.
- Kemenangan, A. N., & Setiawan, L. (2021). Review Review of National Economic Recovery Program in Indonesia. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 3(1), 72–90. <https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss1.art97>
- Lestyowati, J., & Faza Kautsarina, A. (2020). Implementasi Realokasi Anggaran Dan Refocussing Kegiatan Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Bdk Yogyakarta. In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (pp. 424–439).
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, A. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Putra, Y. P. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Anggaran Aspek Implementasi Pada Satuan Kerja Lingkup Bpkp Ri: Analisis Perbandingan. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 3(2), 92–112. <https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss2.art122>